

# **ANALISIS DIMENSI PENGUATAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH PEMERINTAH DESA PUSAKANAGARA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

**Aldi Nurdiana<sup>1</sup>, Wawan Risnawan<sup>2</sup>, Eet Saeful Hidayat<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>123</sup>*

E-mail : aldi\_nurdiana@student.unigal.ac.id

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan dimensi penguatan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Desa Pusakanagara, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Ciamis. Permasalahan ini terlihat dari lemahnya upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM, baik dari aspek manajerial, kewirausahaan, maupun kemandirian usaha. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Pusakanagara melaksanakan peran strategisnya dalam dimensi penguatan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa dan pelaku UMKM lokal. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum secara maksimal melakukan pelatihan usaha dan pendampingan manajerial terhadap pelaku UMKM. Rendahnya frekuensi pelatihan, minimnya kerja sama dengan pihak eksternal, serta tidak adanya evaluasi program menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan program pelatihan berbasis kebutuhan lokal, kemitraan strategis, dan pembentukan sistem pendampingan berkelanjutan agar UMKM desa mampu berkembang secara mandiri dan berdaya saing.*

**Kata Kunci :** *UMKM, pemberdayaan, penguatan, pemerintah desa, kemandirian usaha.*

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis dalam struktur ekonomi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. UMKM telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai krisis

ekonomi dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap

PDB serta menyerap 97% tenaga kerja nasional. Di wilayah pedesaan, UMKM menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi sumber daya dan kearifan lokal masyarakat.

Namun demikian, sebagian besar UMKM, khususnya yang berada di desa, masih menghadapi tantangan mendasar seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan, rendahnya kapasitas manajerial, minimnya pencatatan administrasi keuangan, serta belum optimalnya dukungan dari pemerintah desa. Kondisi ini diperkuat oleh pendapat Tambunan (2019:74), yang menyebutkan bahwa UMKM di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha tradisional yang belum memiliki daya saing dan kemampuan manajemen usaha yang memadai. Prasetyo dan Santosa (2021:49) juga menegaskan bahwa keterbatasan keterampilan teknis dan rendahnya literasi digital menjadi penghambat utama dalam upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

Dalam kerangka pemberdayaan ekonomi desa, peran pemerintah desa sangat strategis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola pembangunan desa berdasarkan inisiatif lokal, termasuk dalam sektor ekonomi. Kepala desa memiliki otoritas untuk menyusun dan menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya

melalui dukungan terhadap pelaku UMKM. Menurut Wahyudi dan Yuliana (2020:22), optimalisasi kewenangan desa akan lebih berdampak bila dikembangkan melalui pendekatan pemberdayaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata warga desa.

Salah satu pendekatan pemberdayaan yang relevan adalah model lima dimensi pemberdayaan menurut Suharto (2021:67–68), yang meliputi: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dari kelima dimensi tersebut, dimensi penguatan menjadi fokus utama dalam konteks pemberdayaan UMKM, karena secara langsung berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mandiri dan tidak tergantung pada intervensi luar.

Dimensi penguatan menurut Suharto mencakup proses peningkatan keterampilan teknis, pengembangan kepercayaan diri, kemampuan mengelola usaha, serta penguasaan pengetahuan dasar manajerial dan administrasi. Penguatan tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga mencakup pendampingan, penyediaan akses informasi, dan pembentukan pola pikir wirausaha. Hidayat dan Nugroho (2021:88) menegaskan bahwa penguatan kapasitas adalah jantung dari strategi pemberdayaan, karena memungkinkan pelaku usaha kecil untuk tumbuh secara mandiri dan

berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan dimensi penguatan menjadi kunci keberhasilan transformasi UMKM desa menuju usaha yang produktif dan berdaya saing.

Desa Pusakanagara, yang terletak di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi UMKM lokal yang cukup berkembang, terutama dalam sektor makanan ringan, kerajinan rumah tangga, dan usaha olahan lokal. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah desa belum secara optimal mengarah pada dimensi penguatan. Pelatihan tidak dilakukan secara terencana dan rutin, kemampuan manajerial pelaku usaha masih rendah, serta belum tersedia mekanisme pendampingan yang sistematis. Fitriani dan Nurdin (2023:139) mencatat bahwa tanpa pendekatan penguatan yang terstruktur, pelaku UMKM akan tetap bergantung pada pola usaha tradisional yang sulit berkembang secara profesional.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemandirian pelaku UMKM dalam menyusun strategi usaha, mengelola keuangan, serta mengembangkan jangkauan pemasaran. Rachbini (2015:49) menyatakan bahwa penguatan kapasitas pelaku usaha merupakan landasan penting bagi terbentuknya sistem ekonomi rakyat yang inklusif dan resilien. Maka dari itu, upaya

penguatan oleh pemerintah desa menjadi hal mendesak untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi penguatan dalam pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk program yang dilaksanakan, mekanisme pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta strategi penguatan yang relevan dalam mendukung transformasi UMKM menuju usaha yang lebih mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Pusakanagara, khususnya pada dimensi penguatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi terhadap pelaku UMKM dan perangkat desa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen desa, dan

referensi teoritis. Sumber data ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria informan yang memahami proses pemberdayaan UMKM, yaitu tiga orang perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan) serta empat pelaku UMKM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data melalui perbandingan antar sumber dan metode.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014:31) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang dilakukan secara simultan sejak awal hingga akhir proses penelitian.

Sebagai alat ukur, penelitian ini mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto (2021:67–68), dengan fokus pada dimensi penguatan, yang dioperasionalkan melalui dua indikator yaitu:

1. Pelatihan kewirausahaan dan manajerial yang diselenggarakan pemerintah desa, dan
2. Kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara mandiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai dimensi penguatan dalam pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis saat ini dapat dikatakan belum berjalan. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan dimensi penguatan dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto (2021:67–68), yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian pelaku usaha agar mampu mengelola usahanya secara mandiri.

Dalam penelitian ini, dimensi penguatan dianalisis melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu:

### **1. Adanya Pelatihan Kewirausahaan dan Manajerial bagi Pelaku UMKM**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa pelatihan kewirausahaan dan manajerial yang secara langsung diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Pusakanagara kepada pelaku UMKM belum berjalan dengan baik. Salah satu pelaku usaha makanan ringan menyampaikan bahwa selama menjalankan usahanya belum pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa secara langsung. Pelatihan yang pernah diterima berasal dari instansi luar seperti dinas atau lembaga eksternal, namun bersifat tidak rutin, terbatas, dan belum menjangkau semua pelaku UMKM di desa.

Hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pelatihan ini antara lain adalah belum adanya perencanaan dan alokasi anggaran khusus dalam APBDes untuk program peningkatan kapasitas non-fisik seperti pelatihan kewirausahaan. Selain itu, masih rendahnya inisiatif perangkat desa dalam menjalin kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, atau mitra swasta yang dapat mendukung program pelatihan juga menjadi faktor penghambat. Pemerintah desa juga belum memiliki data kebutuhan pelaku UMKM secara sistematis, sehingga belum dapat menyusun pelatihan yang berbasis kebutuhan nyata pelaku usaha.

Meski demikian, upaya yang mulai dilakukan oleh pemerintah desa antara lain adalah menjalin komunikasi awal dengan dinas terkait untuk mendapatkan peluang pelatihan dari luar, serta memberikan informasi secara informal kepada pelaku UMKM mengenai pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Pemerintah desa juga berencana untuk mulai mengintegrasikan program pelatihan ke dalam perencanaan pembangunan desa ke depan, namun belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau program tetap.

Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2019:82), yang menyatakan bahwa pelatihan manajerial merupakan elemen penting dalam memperkuat daya saing dan keberlangsungan usaha kecil.

Sementara itu, menurut Suharto (2021:67), penguatan sebagai dimensi pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas individu agar mampu mengelola kehidupan secara mandiri melalui akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, hambatan, upaya awal yang dilakukan, serta teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa indikator pelatihan kewirausahaan dan manajerial belum berjalan secara efektif. Pemerintah desa belum menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menyusun program pelatihan yang terstruktur. Kurangnya sinergi lintas sektor dan ketiadaan pemetaan kompetensi pelaku usaha menyebabkan pelatihan belum menjadi prioritas dalam kebijakan pemberdayaan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret seperti integrasi program pelatihan dalam RPJMDes, kerja sama dengan pihak eksternal yang terpercaya, serta penyusunan modul pelatihan berbasis kebutuhan lokal sebagai bagian dari strategi penguatan UMKM yang berkelanjutan.

## **2. Kemampuan UMKM dalam Mengelola Keuangan dan Administrasi secara Mandiri**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Pusakanagara masih belum memiliki kemampuan yang

memadai dalam mengelola keuangan dan administrasi usahanya secara mandiri. Banyak dari mereka belum memiliki pencatatan pengeluaran dan pemasukan, tidak membuat laporan usaha, bahkan tidak mencatat daftar pelanggan atau stok barang. Sebagian besar pelaku usaha menjalankan bisnis hanya berdasarkan kebiasaan atau ingatan, tanpa perencanaan keuangan yang terarah.

Hambatan utama yang ditemukan antara lain adalah rendahnya literasi keuangan dan administrasi pelaku UMKM, belum adanya pelatihan atau pembinaan teknis dari pemerintah desa yang secara khusus membahas pencatatan keuangan usaha, serta tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan usaha warga. Pemerintah desa juga belum memiliki data perkembangan UMKM yang memadai sebagai dasar untuk merancang program pembinaan yang tepat sasaran.

Sebagai upaya awal, pemerintah desa mengaku pernah memberikan imbauan secara informal agar pelaku usaha mulai melakukan pencatatan sederhana, namun belum ditindaklanjuti dengan program pelatihan atau pendampingan yang konkret. Selain itu, belum ada kerja sama antara desa dengan instansi teknis seperti Dinas Koperasi atau lembaga pelatihan untuk membekali pelaku UMKM dengan kemampuan administrasi dasar. Pemerintah desa

juga belum menugaskan perangkat khusus yang fokus dalam membina UMKM secara teknis dan administratif.

Menurut Edi Suharto (2021:67), penguatan dalam konteks pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas teknis dan administratif masyarakat sebagai dasar untuk membentuk kemandirian. Tanpa kemampuan dalam mengelola keuangan dan administrasi, UMKM akan tetap berada pada level usaha kecil tradisional yang sulit berkembang, tidak terukur, dan tidak memiliki daya saing.

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan, hambatan yang dihadapi, serta teori yang mendasari, dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan administrasi belum menunjukkan hasil yang baik. Pemerintah desa belum memiliki program yang mendorong pelaku UMKM agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan terencana. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan terus menghambat pertumbuhan UMKM lokal dan membuat mereka sulit naik kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret berupa pelatihan administrasi usaha yang praktis, pendampingan berkala, serta penyusunan sistem monitoring sederhana yang dapat dijalankan oleh perangkat desa bersama pelaku UMKM agar proses pemberdayaan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan dimensi penguatan dalam pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Pusakanagara Kecamatan Bareggbeg Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal. Pelatihan kewirausahaan dan manajerial belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh, dan sebagian besar pelaku UMKM belum mampu mengelola keuangan serta administrasi usaha secara mandiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM masih terbatas. Kegiatan pelatihan dan pendampingan belum dirancang sesuai kebutuhan, dan belum ada sistem pembinaan yang terstruktur. Akibatnya, pelaku UMKM masih kesulitan menjalankan usaha secara profesional dan mandiri.

Pemerintah desa memang telah melakukan upaya awal seperti menjalin komunikasi dengan dinas terkait dan menyampaikan informasi pelatihan dari luar. Namun, langkah tersebut perlu ditingkatkan dengan menyusun program pelatihan yang jelas, mengalokasikan anggaran yang cukup, dan menjalin kerja sama dengan pihak luar yang sesuai agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rachbini, Didik Junaedi. (2015). Ekonomi politik dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, Edi. (2021). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat: Perspektif teori dan praktik. Bandung: Refika Aditama.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan. (2019). Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting. Jakarta: LP3ES.
- Arifin, Mohamad, Lestari, Rika, & Huda, Muhammad Syahreza. (2022). Penguatan UMKM desa sebagai strategi pemulihan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 110–118.
- Fitriani, Siti, & Nurdin, Muhammad. (2023). Strategi pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal di desa wisata. *Jurnal Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*, 5(2), 133–143.
- Hidayat, Abdul, & Nugroho, Angga. (2021). Penguatan kapasitas pelaku usaha dalam kerangka pemberdayaan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 9(1), 85–91.

- Prasetyo, Wahyu, & Santosa, Bambang. (2021). Analisis daya saing UMKM berbasis digitalisasi dan manajerial. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(1), 45–54.
- Wahyudi, Fajar, & Yuliana, Sri. (2020). Implementasi kebijakan pemberdayaan desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 4(1), 20–29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.